SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH :

LISA PRATIWI
220412014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2026

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

LISA PRATIWI

220412014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2026

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh :

LISA PRATIWI
220412014

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Taluk Kuantan, 15 September 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Diskhamarzaweny, SE., MM	Yeni Sapridawati, SE., M.AK
NIDN. 1012038701	NIDN. 1011019002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Yeni Sapridawati, SE., M.AK
NIDN. 1011019002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh :

LISA PRATIWI
220412014

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal 21 September 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO.	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Irwan, SE.,MM	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak	Sekretaris/Pembimbing 2	2.
3.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Pembimbing 1 / Anggota 1	3.
4.	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Sarjan M.Sos., M.Si
NIDN.1008128002

Ketua
Program Studi Akuntansi

Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: LISA PRATIWI
NPM	: 220412014
Program Studi	: AKUNTANSI
Fakultas	: ILMU SOSIAL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI."** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 9UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, 15 September 2026



LISA PRATIWI
220412007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

‘ Rencana dibumi, bertawakal kepada langit”

(QS.al-baqarah 286)

“Langkahku yang kecil, pertolongan Allah yang sangat besar”

“Setiap gelap, pasti ada fajar, setelah sulit, pasti ada mudah”

(QS. Al-insyirah:5)

“Bersabarlah, Allah sedang menyiapkan kejutan terbaik untukmu’

“Sedikit syukur, banyak nikmat, sedikit sabar banyak jalan’

“Hasbunallah wa ni’mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT.

“Rencana dibumi, bertawakal kepada langit” kalimat inilah yang menguatkan saya hingga dititik ini. Shalawat untuk Rasulullah SAW. Dengan setulus hati, karya ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu. Terimakasih karena sudah mengajarkan saya bahwa ‘setiap gelap pasti ada fajar” . Setelah sulit pasti ada mudah’. Terima kasih sudah menjadi rumah pertama saya belajar “Sedikit syukur, banyak nikmat” dan “Sedikit sabar, banyak jalan”. Do’a peluk, dan “Hasbunallah wa ni’mal wakil” dari kalian adalah pertolongan Allah yang sangat besar dalam langkah kecil saya ini. Semoga Allah membalas cinta kalian berlipat-lipat. Amiiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan penulisan usulan proposal skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan SingingI” ini dengan baik. Oleh karena itu,dalam kesempatan ini penulis sangat berterimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani,S.Pd.I.,M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan M, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu SosialUversitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Yeni Sapridawati, SE., M. Ak** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Diskhamarzaweny, SE.,MM** selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Yeni Sapridawati, SE., M. Ak** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Kedua Orang Tua Ayah **Untung Musdi** dan Ibu **Butet (Almh)** yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara kandung penulis **Doris Prayoga** dan **Novalindo Pramudia** yang telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 yang telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi dalam penyusunan proposal ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan proposal ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan penulis, semoga usulan proposal ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Teluk Kuantan, 04 Januari 2026

Penulis.

LISA PRATIWI

NPM. 220412014

ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

LISA PRATIWI
DISKHAMARZAWENY
YENI SAPRIDAWATI

Penerapan teknologi informasi dalam sektor publik menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan yang meliputi aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat pegawai pengelola keuangan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, serta diperkuat melalui observasi langsung dan analisis dokumentasi. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD pada Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan terstruktur dan membuat proses pengelolaan anggaran menjadi lebih terarah, transparan, serta data keuangan lebih mudah ditelusuri dibandingkan mekanisme sebelumnya. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain hambatan teknis akibat server pusat yang sering melambat (down), proses adaptasi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pegawai senior yang belum terbiasa dengan komputerisasi, serta tingginya kebutuhan waktu untuk pemeriksaan dan koreksi data saat terjadi perubahan anggaran dalam jumlah besar. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendampingan atau pelatihan berkala serta peningkatan ketelitian dalam proses penginputan data anggaran.

Kata kunci : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION AGENCY OF KUANTAN SINGINGI

LISA PRATIWI
DISKHAMARZAWENY
YENI SAPRIDAWATI

The implementation of information technology in the public sector has become an essential instrument for achieving good governance, particularly in local financial management. This study aims to analyze the implementation of the Local Government Information System (SIPD) for Finance, which encompasses budget planning, execution and administration, accounting and reporting, as well as accountability for local financial execution at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Kuantan Singingi Regency, while also identifying the constraints faced during its execution. A descriptive qualitative research approach was employed in this study. Data collection was conducted through semi-structured interviews with four financial management employees selected via purposive sampling, complemented by direct observation and documentation analysis. Data validity was verified using data source triangulation. The results indicate that the implementation of SIPD at the Disdukcapil of Kuantan Singingi Regency has been structured and has made the budget management process more directed, transparent, and easier to trace compared to the previous mechanism. Nonetheless, its implementation still encounters several obstacles, including technical glitches caused by the central server frequently slowing down or crashing, adaptation and human resource capacity challenges-particularly among senior employees unaccustomed to the new computerized system-and the substantial time required for checking and correcting data when large-scale budget changes occur. This study suggests the necessity of enhancing employee competencies through routine mentoring or training and increasing precision during the financial data entry process.

Keywords : Local Government Information System (SIPD), Local Financial Management, Department of Population and Civil Registration

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
MOTTO
KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iii
ABSTRACK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Sistem Informasi 8
2.1.1 Definisi Sistem Informasi 8
2.1.2 Manfaat dan Kualitas Informasi 8
2.2 Sistem Informasi Manajemen 10
2.2.1 Definisi Sistem Informasi manajemen 10
2.2.2 Tugas Sistem Informasi Manajemen 11
2.2.3 Fungsi Sistem Informasi Manajemen 12
2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 12
2.3.1 Definisi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 12
2.3.2 Ruang Lingkup SIPD 14
2.3.3 Fungsi Program Aplikasi SIPD 14
2.3.4 Manfaat SIPD Keuangan 15
2.3.5 Unsur SIPD Keuangan 16
2.4 Penelitian Terdahulu 17
2.5 Kerangka Pemikiran 21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 22
3.1 Rancangan Penelitian 22

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 22
3.2.1 Tempat Penelitian 22
3.2.2 Waktu Penelitian 22
3.3 Populasi dan Sampel 23
3.3.1 Populasi 23
3.3.2 Sampel 23
3.4 Jenis dan Sumber Data 24
3.4.1 Jenis Data 24
3.4.2 Sumber Data 24
3.5 Teknik Pengumpulan Data 25
3.6 Teknik Analisis Data 26
3.7 Pengecekkan Validasi Data 26
3.8 Tahap-tahap Penelitan 27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 28
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 28
4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 28
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 31
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 32
4.1.4 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 33
4.2 Hasil Penelitian 38
4.2.1 Penerapan SIPD 38
4.2.1.1 Penerapan SIPD dalam Perencanaan Anggaran Daerah 39
4.2.1.2 Penerapan SIPD dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 42
4.2.1.3 Penerapan SIPD dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 46
4.2.1.4 Penerapan SIPD dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah 51

4.2.2 Kendala dalam Penerapan SIPD 52
4.3 Pembahasan 54
BAB V PENUTUP 60
5.1 Kesimpulan 60
5.2 Saran..... 61
DAFTAR PUSTAKA..... 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 17

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 23

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 21

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi..... 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi

Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 3. Surat Balasan Riset

Lampiran 4. Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi

Lampiran 5. Lembar Persetujuan Pembimbing untuk reivisi Proposal

Lampiran 6. Lembar Persetujuan Pembimbing untuk reivisi Skripsi

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini sudah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi informasi menyampaikan banyak sekali keringanan untuk mendapatkan informasi, menolong menuntaskan kesibukan serta menyampaikan pelayanan yang maksimal pada pengguna. Salah satu produk teknologi informasi yang dipergunakan oleh banyak institusi baik swasta, pemerintahan maupun dalam bidang pendidikan yaitu sistem informasi. Sistem informasi ialah kombinasi dari empat bagian primer yang meliputi aplikasi, perangkat keras, infrastruktur dan sumber daya terlatih (Arya S:2022). Penggunaan sistem informasi membantu pada aktivitas operasional instansi karena dengan adanya sistem informasi membuat data serta informasi yang diperlukan lebih mudah dihasilkan.

Perkembangan teknologi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Bergulirnya UU No.22/1999 yang diperbarui dengan UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.25/1999 yang diperbarui dengan UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola

aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara (Nur:2023).

Sistem informasi serta teknologi menjadi sangat penting untuk era saat ini sehingga dapat berperan luas tidak terkecuali bagi organisasi lingkup pemerintahan atau sektor publik. Salah satu lingkupnya yaitu pemerintah daerah. Perkembangan pada sistem teknologi sektor publik, khususnya di Indonesia begitu pesat, hal itu dapat kita lihat dari adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan itu sendiri, dapat membantu proses bisnis dan kegiatan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, komunikasi serta kolaborasi (Aulia: 2021).

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengelolaan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerahnya (Irmayani N: 2017).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut: "Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik."

Efektivitas penerapan sistem informasi merupakan hasil yang diperoleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Sistem informasi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien (Nafischa E.N:2021).

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah direalisasikan dalam bentuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan. SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang menggantikan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia (Zulfikar F.A:2022).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai alat bantu dalam pengelolaan data dan informasi pemerintahan. SIPD dirancang untuk membantu instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Penerapan SIPD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja pegawai serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kuantan Singingi No. 04 Tahun 2008 dan keputusan Bupati Kuantan Singingi No. 22 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dimana tugas pokoknya adalah kewenangan otonomi daerah di bidang Kependudukan Pencatatan Sipil di daerah.

Berikut jenis-jenis pelayanan yang ada di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut:

1. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
2. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
3. Surat pindah
4. Kartu Identitas Anak (KIA)

5. Pembuatan kutipan akta kelahiran
6. Kutipan akta kematian
7. Kutipan akta perceraian
8. Pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak
9. Pencatatan perubahan nama
10. Pencatatan perubahan kewarganegaraan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu perangkat daerah kini telah beralih menggunakan SIPD dalam mendukung aktivitas administrasi dan pengelolaan data, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh OPD untuk menggunakan SIPD menggantikan SIMDA. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan sistem informasi seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem, serta kendala teknis yang dapat menghambat optimalisasi sistem (Mulyadi,2016). Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas penerapan SIPD dalam mendukung pelayanan publik.

Penelitian ini merupakan acuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Amri (2022). Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitiannya. Penelitian Zulfikar berlokasi di Kecamatan Semarang Timur, sedangkan penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi".**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang meliputi Perencanaan Anggaran Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi di bidang sistem informasi manajemen, khususnya mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada instansi pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan penerapan SIPD Keuangan.
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan sistem informasi pemerintah daerah.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

2.1.1 Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi adalah serangkaian komponen-komponen yang mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, menyebarkan data dan informasi serta menyediakan suatu mekanisme timbal balik untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi adalah suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manjerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakaan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Sri Yuli Y: 2019).

Menurut Tata Sutabri (2016) sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungis operasi organisasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Saa'dillah (2016) sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi, serta menjelaskan bahwa unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (*input*), pengolahan (*processing*) dan keluaran (*output*).

2.1.2 Manfaat dan Kualitas Informasi

1. Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para penggunanya. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri adalah :

1. Menambah pengetahuan. Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengurangi ketidak pastian pemakai informasi. Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.
3. Mengurangi risiko kegagalan. Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.
4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan. Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.
5. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

2. Kualitas Informasi

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut (Nafischa E.N:2021) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam karakteristik, yaitu :

a. Akurasi (*accuracy*), Informasi dikatakan akurasi yaitu informasi harus jelas mencerminkan maksud yang disampaikan dan harus bebas dari kesalahan-kesalahan.
b. Ketepatan waktu (*timelines*) Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi

yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan.

c. Relevan (*relevance*) Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya.

2.2 Sistem Informasi Manajemen

2.2.1 Definisi Sistem Informasi manajemen

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Sistem adalah “kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama”. Informasi adalah “hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat”. Manajemen didefinisikan sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi” (Irmayani N:2017).

Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”. Sistem informasi manajemen adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen (Irmayani N:2017).

Sistem informasi manajemen (SIM) adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. SIM juga sangat bemanfaat dalam mendukung manajemen dalam mengambil keputusan dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Tujuan utama dari SIM ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi untuk memudahkan pihak

manajemen dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan (Nur Aulia R:2023).

2.2.2 Tugas Sistem Informasi Manajemen

a. Pengumpulan Data

   Bagian pengumpul data bertugas untuk mengumpulkan data baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Pihak dalam perusahaan yang menjalankan tugas ini diambil dari seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi, sehingga setiap unit kerja terwakili dalam sim.

b. Penyimpanan Data

   Data yang terkumpul selanjutnya disimpan untuk segera di proses atau ditunda pemrosesannya, tergantung kebutuhan para manajer.

c. Pemprosesan Data

   Pemprosesan data dapat dilakukan oleh satu atau beberapa ahli. Bila datanya terlalu banyak, jasa dari tenaga-tenaga pengumpul dan insidential dapat dimanfaatkan, bagian inilah yang membuat data itu berubah bentuk menjadi informasi yang disesuaikan dengan permintaan manajer

d. Pemprograman Data

   Setiap komputer memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Agar komputer dapat melaksanakan tugasnya, maka perintah-perintah terhadap data yang terkumpul harus diubah terlebih dahulu sesuai dengan bahasa yang digunakan. Pekerjaan inilah yang disebut pemprograman, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidang komputer.

2.2.3 Fungsi Sistem Informasi Manajemen

a. Meningkatkan aksebilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengahruskan adanya perantara sistem informasi.
b. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
c. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
d. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
e. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
f. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi dari sistem informasi dan teknologi baru.
g. Memperbaiki produktifitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
h. Mengolah transaksi-transaksi, mmengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.

2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

2.3.1 Definisi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem ini menggantikan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang sebelumnya dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Zulfikar F.A., 2022).

mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing Menurut Dione dan Utami (2020), sistem informasi SIPD dapat digunakan untuk -masing instansi pemerintah. Selain itu, fungsi SIPD sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan.

Berdasarkan pengertian SIPD yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa SIPD merupakan sistem informasi yang dapat membantu dalam penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi data dan informasi pembangunan daerah secara elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nasional. SIPD memiliki fungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, real time dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.

Alat ukur SIPD merupakan sebuah skala yang digunakan untuk mengukur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. SIPD sebagai program aplikasi ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

2.3.2 Ruang Lingkup SIPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, ruang lingkup SIPD meliputi:

1. Informasi Pembangunan Daerah. SIPD mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait, meliputi kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah. SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi, yang meliputi: Perencanaan Anggaran Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah.
3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya. SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Peraturan Daerah (PERDA), dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

2.3.3 Fungsi Program Aplikasi SIPD

Berikut beberapa fungsi aplikasi SIPD Keuangan:

1. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat.

3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.
5. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.
6. Mendukung integrasi pemanfaatan data terkait perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.
7. Berfungsi sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

2.3.4 Manfaat SIPD Keuangan

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan SIPD Keuangan (Zulfikar F.A:2022) adalah sebagai berikut:

1. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama.
2. Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data aman).
3. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai kebutuhan dimana output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.
4. Sesuai Peraturan. Dengan menerapkan aplikasi SIPD Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

5. Terintegrasi. SIPD merupakan program aplikasi keuangan daerah yang mengintegrasikan tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
6. Akuntabilitas Publik. SIPD memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah dan capaian-capaian pembangunan daerah secara transparan.

Adapun keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan SIPD Keuangan adalah:

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Berbasis web (online), sehingga memudahkan akses dari berbagai lokasi secara real time.
3. Validasi inputan data lebih terjamin.
4. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi.
5. Memfasilitasi akuntansi penggunaan anggaran.

2.3.5 Unsur SIPD Keuangan

Ruang lingkup dan arsitektur SIPD terdiri dari beberapa unsur pokok (Permendagri No. 70 Tahun 2019), yaitu:

1. Akses, melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.

2. Portal, pelayanan publik berupa situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi, yaitu organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

Output yang dihasilkan dari SIPD Keuangan adalah:

1. Penganggaran: Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Penatausahaan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), Register, Surat pengendalian lainnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulfikar Fikri Amri (2022)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat indikator implementasi SIPD

		Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan (Studi Kasus Kecamatan Semarang Timur)	(komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) telah berjalan baik, kecuali pada aspek sumber daya terdapat kendala ketersediaan dan akurasi data pendukung. Kualitas laporan keuangan telah memenuhi indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
2	Vitriana, N., Agustiawan, A. & Ahyaruddin, M. (2022)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru	Penerapan SIPD di BPKAD Pekanbaru menggantikan SIPKD dan memberikan kemudahan input data keuangan. Namun pencairan insentif PNS dan beberapa fungsi lain masih terkendala oleh sistem yang belum stabil.
3	Pramana, A. C. (2023)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD Kabupaten Nganjuk	SIPD di BPKAD Nganjuk berdampak positif terhadap akurasi dan kecepatan pelaporan keuangan. Hambatan utama adalah sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan sistem berbasis digital.
4	Wibowo, D. A., Sasanti, E. E. & Nurabiah, N. (2023)	Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah	SIPD di Bappeda Kota Mataram mempermudah proses penatausahaan dan perencanaan anggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD

		pada Bappeda Kota Mataram	berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5	Nirmala, D., Iffansyah, & Zakir, M. (2023)	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala	SIPD telah diterapkan pada seluruh OPD di Kab. Donggala termasuk DTPHP, namun SDM belum cukup memadai. Penatausahaan dan pelaporan keuangan melalui SIPD belum berjalan maksimal.
6	Rezkiaty, A. H. (2023)	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BKAD Kabupaten Bulukumba	Evaluasi menunjukkan SIPD membantu peningkatan kualitas laporan keuangan di BKAD Bulukumba. Namun masih diperlukan peningkatan SDM dan perbaikan infrastruktur jaringan untuk optimalisasi sistem.
7	Arif, R. N. & Firmansyah, A. (2024)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	SIPD RI memberikan kemudahan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Implementasi berjalan cukup baik namun masih menghadapi kendala teknis pada server dan belum meratanya pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur sistem.
8	Alfarishi, A. F. & Hartati, S. (2024)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Penerapan SIPD di BPKAD Kota Palembang mampu meningkatkan efisiensi

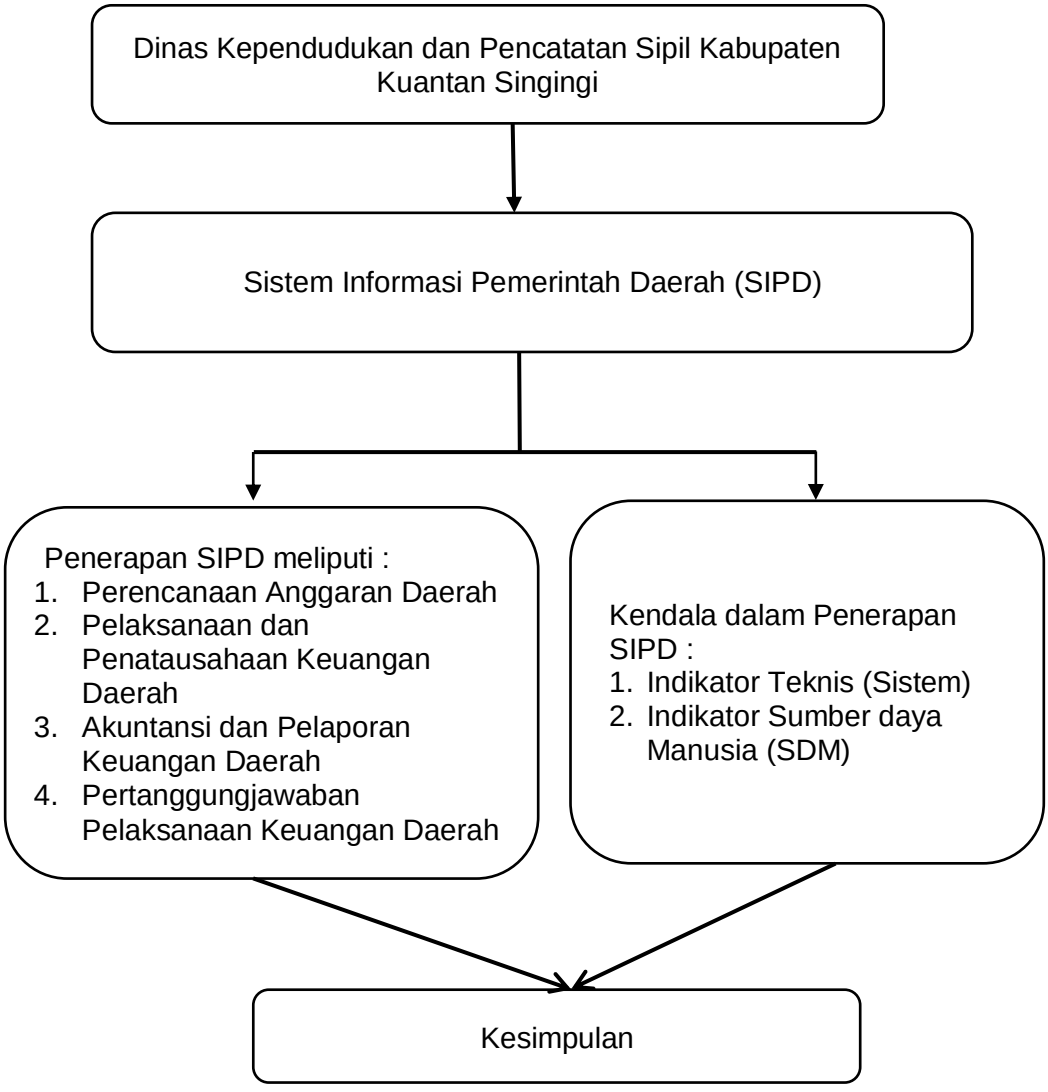
		(SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang	pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem.
9	Septiani, D. (2024)	Evaluasi Efektivitas Penggunaan SIPD dalam Penyusunan Anggaran pada Disdukcapil Kab. Batang	Antarmuka SIPD secara umum baik, namun stabilitas server masih bermasalah (sering down). SDM belum sepenuhnya memahami sistem. SIPD membantu transparansi anggaran meski implementasi belum sepenuhnya efektif.
10	Agiltriawan, A., Ilham, M. & Hanif, I. F. (2025)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Instansi Pemerintah Daerah	Penerapan sistem informasi manajemen (termasuk SIPD) pada instansi pemerintah daerah secara umum telah meningkatkan efektivitas pengelolaan data. Tantangan utama mencakup kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, dan koordinasi antar-unit kerja.

2.5 Kerangka Pemikiran

Peneliti akan memberikan gambaran umum terhadap alur pemikiran penelitian agar lebih jelas dan terarah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: *Zulfikar Fikri Amri (2022).*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena fokusnya adalah memahami secara mendalam bagaimana penerapan SIPD Keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung dalam praktik sehari-hari. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, dan realita pelaksanaan SIPD berdasarkan pandangan para pihak yang terlibat, terutama pegawai dan pengguna sistem informasi di instansi tersebut. Pendekatan ini dianggap tepat karena konteks sosial dan kebijakan sangat kuat mempengaruhi penggunaan teknologi informasi di pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian kualitatif mampu menjelaskan fenomena kompleks seperti integrasi sistem informasi, hambatan teknis, hingga persepsi pengguna tentang manfaat sistem (misalnya kemudahan pengolahan data dan akurasi informasi) dalam operasional SIPD.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai objek utama studi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di bulan Des 2025 sampai dengan Sept 2026, adapun jadwal kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan									
		Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ags 2026	Sep 2026
1	Penyusunan Proposal										
2	Proposal Diterima										
3	Bimbingan Proposal										
4	Seminar Proposal										
5	Revisi Proposal										
6	Pengumpulan Data										
7	Bimbingan Skripsi										
8	Ujian Skripsi										

Sumber : Peneliti, 2026

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:112), populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seleruh pegawai Dinas Kependududukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 87 orang yang terdiri dari 20 orang PNS dan 67 orang PPPK.

3.3.2 Sampel

Untuk menentukan sampel, penelitiian ini menggunakan teknik purposive sampling. Yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai

dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua pegawai memiliki pengetahuan dan keterlibatan secara langsung dalam penerapan Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Disdukcapil kabupaten kuantan singingi yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam penerapan SIPD yang berjumlah 4 orang yang meliputi :

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Jabatan	Nip	Nama
1.	Perencana Ahli Muda	198111212008012019	NOPA SRIWANI, SE
2.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	198009252005011007	TEKAD KURNIAWAN,S.ST
3.	Kabid Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	97202112001121004	YASRIZON,S.Sos
4.	Kasubbag Keuangan	198005212006042005	RATNA WILIS, SE

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi serta dokumentasi/arsip perusahaan berupa gambaran umum, struktur organisasi dan Job Description.

3.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan hasil wawancara Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Perencana Ahli Muda, Kasubbag Keuangan Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi dengan total 4orang.

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi serta data yang relevan dengan topik riset.

2. Data Sekunder

   Data yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi, literatur akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta regulasi terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik :

1. **Wawancara Semi-Terstruktur**

   Wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya mereka yang memahami dan menjalankan SIPD. Wawancara bersifat terbuka agar responden bebas menjelaskan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi.

2. **Observasi**

   Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas penggunaan SIPD, baik saat input data, pemrosesan informasi, atau penyajian laporan.

3. **Dokumentasi**

   Peneliti mengumpulkan dokumen internal, seperti SOP penggunaan SIPD, laporan instansi, panduan teknis, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penerapan SIPD.

4. **Studi Pustaka**

   Peneliti melakukan telaah literatur terhadap jurnal ilmiah dan referensi akademik untuk memperkuat kerangka teori dan pembahasan dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

   Menyederhanakan data lapangan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi bentuk yang lebih ringkas namun utuh maknanya.

2. **Penyajian Data**

   Mengelompokkan data ke dalam tema-tema penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian, misalnya persepsi pengguna terhadap SIPD, tingkat efektivitas penggunaan, serta kendala yang ditemukan.

3. **Penarikan Kesimpulan**

   Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan pola dan hubungan antar tema yang muncul dari data.

Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan gambaran nyata penerapan SIPD secara komprehensif dan kontekstual, tidak sekadar numerik tetapi juga pengalaman dan penilaian para pengguna sistem.

3.7 Pengecekkan Validasi Data

Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber (misalnya wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur). Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak bias dan relevan dengan realitas di lapangan.

Teknik ini sudah banyak digunakan dalam penelitian kualitatif pada studi sistem informasi pemerintahan untuk meningkatkan kredibilitas temuan.

3.8 Tahap-tahap Penelitan

Adapun tahap-tahap penelitian ini secara garis besar adalah:

1. **Persiapan Penelitian**

   Penyusunan proposal, pengajuan izin penelitian ke instansi terkait, serta koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. **Studi Literatur dan Kerangka Teoretis**

   Mengumpulkan referensi ilmiah dan membuat landasan teori untuk memperkuat konsep penelitian.

3. **Pengumpulan Data Lapangan**

   Melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang diperlukan.

4. **Analisis Data**

   Mengolah data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teknik analisis yang sudah direncanakan.

5. **Validasi dan Triangulasi**

   Membandingkan dan mengecek keakuratan data melalui triangulasi.

6. **Penyusunan Laporan Akhir**

   Menyusun laporan penelitian berupa skripsi yang sistematis dan logis.

Tahapan ini dirancang agar penelitian berjalan secara sistematis, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran jernih tentang bagaimana SIPD diterapkan serta rekomendasi yang berguna bagi pengembangan sistem di masa depan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Pembentukan dinas tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam perkembangannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. RENSTRA digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu. Penyusunan RENSTRA juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi sehingga setiap program dan kegiatan dapat

dilaksanakan secara terarah serta dapat dievaluasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi antara lain untuk merumuskan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas selama periode perencanaan. Selain itu, RENSTRA menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyusun program dan kegiatan tahunan sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. RENSTRA juga disusun untuk membantu aparatur memahami arah kebijakan dan program kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terpadu, terarah, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berperan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Perkembangan kebutuhan pelayanan publik dan kemajuan teknologi informasi kemudian mendorong dinas untuk menyesuaikan pelaksanaan administrasi dengan pemanfaatan sistem informasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan data dan informasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan di lingkungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2009, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, serta melaksanakan

kewenangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan adanya tugas dan kewenangan tersebut, dinas memiliki kedudukan penting dalam memastikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi juga dituntut untuk meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Salah satu sistem yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penerapan sistem informasi tersebut menjadi bagian dari perkembangan tata kelola pemerintahan yang mengarah pada pengelolaan data dan informasi secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien.

Dengan demikian, sejarah perkembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya berkaitan dengan pembentukan kelembagaan sebagai perangkat daerah, tetapi juga mencakup perkembangan pelaksanaan tugas dan pelayanan sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan tersebut menjadi dasar bagi dinas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

1. Visi

   Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

   “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi sebagai Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau Tahun 2026.”

2. Misi

   Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi mengacu pada beberapa misi sebagai berikut:

   a. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman, serta memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat.
   b. Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan, dan demokratis.
   c. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing.
   d. Terwujudnya kemandirian dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan daerah.
   e. Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan

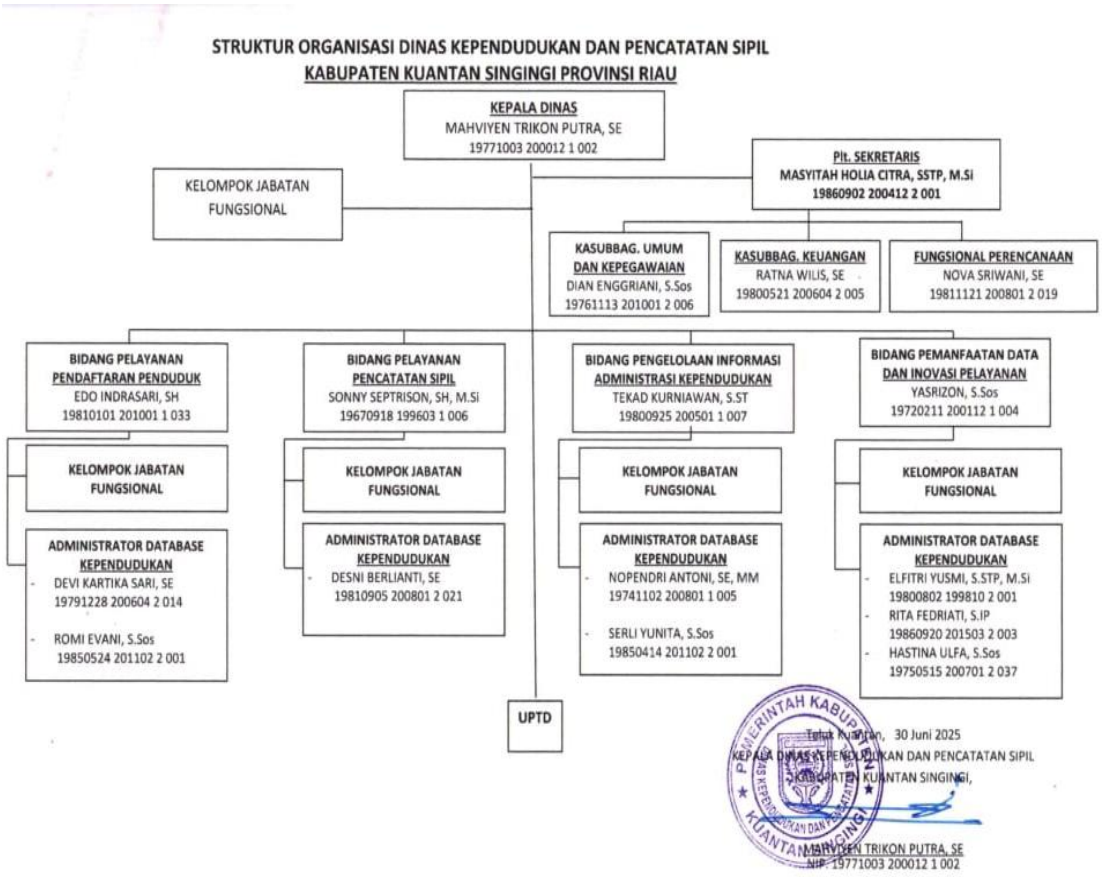
pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Struktur organisasi adalah susunan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggun jawab yang jelas dalam sebuah kantor untuk mengkoordinasikan aktivitas dan mencapai tujuan bersama.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

4.1.4 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kepala Dinas
   a. Tugas

      Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil

   b. Fungsi
      1) Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan
      2) Pelaksanaan kebijakan,pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
      3) Pelaksanaan administrasi
      4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Sekretaris
   a. Tugas

      Melaksanakan koordinasi pelaksaan tugas dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

   b. Fungsi
      1) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah.

2) Penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3) Pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Tugas

1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan.
2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan.
3) Mengoordinasikan dan meyusun rencana anggaran keuangan pada Dinas lingkungan Subbagian Keuangan
4) Melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil.
5) Mengelola keuangan dan penyiapan gaji gaji pegawai.
6) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.
7) Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LPH) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.

8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian keuangan.
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   a. Tugas

      Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   b. Fungsi
      1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
      2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
      3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
      4) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
      5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
   a. Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

b. Fungsi

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. Fungsi

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .

3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

7. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

a. Tugas

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

b. Fungsi

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
4) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keteraampilan tertentu yang di tetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan SIPD

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Penyajian hasil penelitian difokuskan pada proses penerapan SIPD Keuangan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, mulai dari awal penggunaan sistem, alasan penggunaan SIPD Keuangan, hingga tahapan penerapannya dalam mendukung kegiatan pengelolaan keuangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Tekad Kurniawan selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Nova Sriwani selaku Perencana Ahli Muda, dan Yazrizon selaku Kabid Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan serta Ratna Wilis selaku Kasubbag keuangan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20–31 Agustus 2026.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menjadi salah satu bentuk penyesuaian organisasi terhadap perubahan sistem dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui bagaimana awal mula penggunaan SIPD Keuangan di lingkungan dinas, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang informan yang memiliki pengalaman dan keterlibatan dalam kegiatan pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2.1.1 Penerapan SIPD dalam Perencanaan Anggaran Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang, Nova Sriwani, penerapan SIPD dalam perencanaan anggaran di Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi telah mengubah pola penyusunan anggaran dari manual atau aplikasi local sebelumnya menjadi terintegrasi secara nasional. Proses input rencana kerja dilakukan secara langsung kedalam system belanja daerah.

“Kalau awalnya, kami mulai menggunakan SIPD setelah ada ketentuan dari pemerintah daerah. Jadi setelah ada arahan itu, pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan harus disesuaikan dengan sistem SIPD. Pada waktu awal memang masih banyak yang harus dipelajari, karena pegawai sebelumnya sudah terbiasa dengan sistem yang lama. Kami harus memahami bagian-bagian yang ada di dalam SIPD, kemudian menyesuaikan data dan dokumen yang akan dimasukkan. Kalau ada yang belum jelas, biasanya dilakukan koordinasi dengan bagian lain atau pihak yang memang memahami sistemnya. Jadi proses awalnya memang

bertahap, tidak langsung semuanya bisa dikerjakan seperti sekarang. Setelah sering digunakan, pegawai menjadi lebih paham dan pekerjaan juga mulai mengikuti alur yang ada di SIPD." (Hasil wawancara bersama Nova Sriwani selaku Kepala Subbidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

"Kalau dari sisi kami, penggunaan SIPD itu memang karena sudah diarahkan dan harus digunakan dalam pengelolaan keuangan. Jadi kami mengikuti sistem yang sudah ditentukan. Tetapi setelah digunakan, sebenarnya ada juga manfaatnya untuk pekerjaan. Data dan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan jadi lebih tertata karena prosesnya sudah ada di dalam sistem. Pegawai juga jadi tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apa yang dilakukan setelahnya. Yang paling penting itu data yang dimasukkan harus sesuai, karena kalau dari awal ada yang salah biasanya nanti akan berpengaruh ke proses berikutnya. Jadi penggunaan SIPD membuat kami harus lebih teliti dalam menyiapkan data dan dokumen. Kalau sudah terbiasa, pekerjaan jadi lebih mudah diikuti karena alurnya sudah jelas." (Hasil wawancara bersama Nova Sriwani selaku Kepala Subbidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Keterangan Nova Sriwani memperlihatkan bahwa penggunaan SIPD memberikan pengaruh terhadap keteraturan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan. Sistem tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memasukkan data, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengikuti urutan proses pekerjaan. Penekanan informan terhadap ketelitian menunjukkan bahwa kualitas data menjadi bagian penting dalam penerapan SIPD. Data yang tidak sesuai pada tahap awal dapat mempengaruhi proses berikutnya, sehingga pegawai dituntut untuk melakukan pemeriksaan sebelum

melakukan input. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola kerja pegawai yang menjadi lebih memperhatikan ketepatan data dan kelengkapan dokumen.

“Kalau dari awal sampai bisa digunakan, pertama kami harus menyiapkan dulu data yang memang diperlukan. Data itu tidak bisa langsung dimasukkan begitu saja, harus dilihat dulu dokumennya lengkap atau tidak dan apakah datanya sudah sesuai. Setelah itu baru pegawai melakukan input ke SIPD. Sesudah dimasukkan, biasanya kami cek lagi supaya tidak ada kesalahan. Kalau ada yang belum sesuai, diperbaiki terlebih dahulu. Setelah sudah benar, prosesnya dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang ada di sistem. Dalam pelaksanaannya juga perlu koordinasi, karena ada pekerjaan yang datanya berkaitan dengan bagian lain. Jadi tidak hanya satu orang yang bekerja sendiri. Kalau ada kendala atau ada bagian dalam sistem yang belum dipahami, kami melakukan koordinasi supaya pekerjaan tetap bisa dilanjutkan.” (Hasil wawancara bersama Nova Sriwani selaku Kepala Subbidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Dari keterangan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tahapan penerapan SIPD Keuangan sangat bergantung pada kesiapan data dan dokumen sebelum dilakukan input ke dalam sistem. Informan juga menekankan pentingnya koordinasi dalam proses penerapan karena kegiatan keuangan memiliki keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya.

“Sebelum dilakukan input, data anggaran harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi kami melihat dulu dokumennya, kemudian disesuaikan dengan kegiatan yang akan dijalankan. Setelah itu baru operator melakukan input ke

SIPD. Pada waktu input, harus diperhatikan bagian kegiatan, rekening, jumlah anggaran, dan data lainnya supaya sesuai. Setelah selesai dimasukkan, tidak langsung dianggap selesai karena masih perlu dilakukan pemeriksaan. Kalau ada perbedaan antara data di sistem dengan dokumen, harus dicari dulu letak kesalahannya kemudian diperbaiki. Jadi memang perlu ketelitian dari awal sampai data tersebut benar-benar sesuai." (Hasil wawancara bersama Nova Sriwani selaku Kepala Subbidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penginputan anggaran dalam SIPD membutuhkan kesesuaian antara data yang dimasukkan dengan dokumen pendukung. Tahap pemeriksaan menjadi penting karena kesalahan dalam rekening, kegiatan, maupun jumlah anggaran dapat mempengaruhi proses berikutnya. Dengan demikian, proses input tidak hanya menekankan kemampuan operator menggunakan aplikasi, tetapi juga menuntut ketelitian dalam mencocokkan informasi yang terdapat dalam sistem dengan dokumen yang menjadi dasar penganggaran.

4.2.1.2 Penerapan SIPD dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Menurut penjelasan dari informan Yazrizon selaku Kepala Bidang, Penatausahaan keuangan menggunakan SIPD dirancang untuk mempercepat proses pencairan anggaran belanja dinas. Asetiap pengeluaran harus tervalidasi di dalam system sebelum Surat Perintah (SPM) dapat diterbitkan. Proses ini meminimalkan Risiko kesalahan pos anggran belanja.

“Kalau SIPD mulai diterapkan, kami mengikuti perubahan sistem yang memang sudah ditetapkan untuk pemerintah daerah. Jadi dinas harus menyesuaikan pekerjaan dengan sistem yang baru. Awalnya tentu ada proses belajar, karena pegawai harus mengetahui bagaimana alur kerja dalam SIPD dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum data dimasukkan. Selain itu, pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan juga tidak bisa dilakukan sembarangan karena datanya saling berkaitan. Jadi pegawai harus lebih teliti dan memahami tahapan yang ada. Setelah sistem sudah mulai sering digunakan, pegawai menjadi lebih terbiasa. Sekarang penggunaan SIPD sudah menjadi bagian dari pekerjaan dan kegiatan administrasi yang dilakukan di dinas.” (Hasil wawancara bersama Yazrizon selaku Kepala Bidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Keterangan Yazrizon memperkuat bahwa penerapan SIPD Keuangan membawa perubahan terhadap pola kerja pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahap awal, pegawai dituntut untuk memahami alur sistem sekaligus meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan data. Hal tersebut penting karena data keuangan yang dimasukkan ke dalam sistem memiliki keterkaitan dengan tahapan administrasi berikutnya. Setelah melalui proses pembelajaran dan penggunaan secara berulang, SIPD mulai menjadi bagian dari rutinitas pekerjaan pegawai.

Alasan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan SIPD Keuangan dalam pengelolaan keuangan. Informasi mengenai alasan penggunaan sistem tersebut juga diperlukan untuk melihat apakah penerapan SIPD hanya dilakukan sebagai

bentuk mengikuti kebijakan atau terdapat manfaat lain yang dirasakan oleh pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan.

"Kalau proses input anggaran itu pada dasarnya mengikuti data yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi operator tinggal memasukkan sesuai dengan struktur yang ada di SIPD. Yang harus diperhatikan itu kesesuaian antara kegiatan, anggaran, dan dokumennya. Karena data dalam sistem akan digunakan lagi untuk proses berikutnya, maka tidak boleh asal memasukkan. Setelah selesai input biasanya dilakukan pengecekan. Kalau sudah sesuai, baru dilanjutkan ke proses berikutnya. Jadi menurut saya bagian yang paling penting dalam input anggaran adalah kesiapan data dan ketelitian orang yang menginput." (Hasil wawancara bersama Yazrizon selaku Kepala Bidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penginputan anggaran sangat dipengaruhi oleh kesiapan data sebelum dimasukkan ke dalam SIPD. Operator memiliki peran teknis dalam memasukkan data, tetapi kebenaran data tidak hanya menjadi tanggung jawab operator karena data tersebut berasal dari proses perencanaan dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penginputan anggaran merupakan proses yang melibatkan beberapa pihak dan membutuhkan ketelitian pada setiap tahapnya.

Proses pemeriksaan dan verifikasi data sebelum data keuangan diproses melalui SIPD. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan telah sesuai dengan dokumen pendukung serta tidak terdapat kesalahan yang dapat mempengaruhi proses selanjutnya. Tahapan ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketelitian dan

keteraturan pengelolaan data keuangan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

“Sebelum diproses, data memang harus dicek terlebih dahulu. Biasanya yang diperhatikan itu kesesuaian data dengan dokumen, kemudian apakah kegiatan dan anggarannya sudah benar. Kalau ada yang belum sesuai, jangan diteruskan dulu karena nanti bisa menimbulkan masalah pada proses berikutnya. Setelah data sudah diperiksa dan dianggap sesuai, baru bisa dilanjutkan. Jadi verifikasi itu sebenarnya untuk memastikan bahwa data yang masuk ke sistem bukan hanya sudah diinput, tetapi juga sudah benar dan sesuai dengan yang seharusnya.” (Hasil wawancara bersama Yazrizon selaku Kepala Bidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi merupakan tahapan pengendalian sebelum data keuangan dilanjutkan ke proses berikutnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah dimasukkan benar-benar sesuai dengan kegiatan dan dokumen yang menjadi dasar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan SIPD tetap membutuhkan pemeriksaan oleh sumber daya manusia, meskipun proses pengelolaan datanya telah dilakukan melalui sistem elektronik.

Dalam pelaksanaan kegiatan, perubahan anggaran dapat terjadi ketika terdapat penyesuaian kegiatan atau kebutuhan belanja yang berbeda dari perencanaan awal. Untuk mengetahui bagaimana perubahan tersebut dilakukan melalui SIPD Keuangan, peneliti menanyakan proses perubahan anggaran kepada informan penelitian.

“Perubahan anggaran biasanya dilakukan kalau memang ada perubahan kebutuhan atau kegiatan. Tetapi sebelum masuk ke sistem,

perubahan itu harus jelas dulu dasarnya. Setelah disepakati dan dokumennya sudah disiapkan, baru dilakukan penyesuaian dalam SIPD. Setelah itu tetap diperiksa lagi, karena jangan sampai anggaran yang sudah berubah di dokumen ternyata belum sesuai di sistem. Jadi prosesnya tetap dari dokumen dulu, baru sistem mengikuti." (Hasil wawancara bersama Yazrizon selaku Kepala Bidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Keterangan Yazrizon menegaskan bahwa SIPD berfungsi sebagai media untuk mencatat perubahan yang telah ditetapkan secara administratif. Sistem tidak menjadi dasar tunggal dalam menentukan perubahan anggaran, tetapi mengikuti keputusan dan dokumen yang telah disiapkan sebelumnya.

SIPD Keuangan tidak hanya digunakan dalam tahap penganggaran, tetapi juga berkaitan dengan proses setelah anggaran ditetapkan, termasuk pencairan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, peneliti menggali bagaimana keterkaitan penggunaan SIPD dengan kedua proses tersebut.

4.2.1.3 Penerapan SIPD dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

"Awal penggunaan SIPD Keuangan itu karena memang ada arahan dari pemerintah daerah untuk menggunakan sistem tersebut. Jadi dari dinas mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan. Sebelumnya kan sudah ada sistem yang digunakan, kemudian dengan adanya SIPD ini kami harus menyesuaikan lagi. Waktu pertama diterapkan, pegawai tidak langsung terbiasa karena ada beberapa perbedaan dengan sistem yang sebelumnya. Kami harus memahami dulu bagaimana cara kerja SIPD, data apa yang harus disiapkan, kemudian bagaimana proses memasukkan datanya. Jadi pada awalnya lebih banyak proses penyesuaian, terutama bagi pegawai yang memang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Setelah

digunakan beberapa waktu, pegawai mulai terbiasa dengan alurnya dan SIPD kemudian menjadi bagian dari pekerjaan yang dilakukan sehari-hari." (Hasil wawancara bersama Tekad Kurniawan selaku Kepala Bidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan SIPD Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Dinas tidak menentukan sendiri penggunaan sistem tersebut, melainkan melakukan penyesuaian terhadap sistem yang telah diarahkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari keterangan informan juga terlihat bahwa perubahan sistem menuntut pegawai untuk beradaptasi, terutama dalam memahami alur penggunaan, penyiapan data, dan proses input. Artinya, tahap awal penerapan SIPD tidak hanya berkaitan dengan tersedianya aplikasi, tetapi juga kesiapan pegawai sebagai pengguna sistem.

"Kalau alasan utamanya ya karena memang sudah menjadi sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah, jadi kita sebagai OPD harus mengikuti. Tidak mungkin kita tetap menggunakan sistem yang lama sementara sistem yang ditetapkan sudah berubah. Selain itu, dengan SIPD pekerjaan keuangan lebih terarah karena sudah ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Data yang dimasukkan juga tidak bisa sembarangan karena semuanya harus sesuai dengan dokumen yang ada. Jadi menurut saya, selain karena mengikuti kebijakan, SIPD juga membantu supaya pekerjaan lebih tertib. Kita jadi lebih mudah melihat prosesnya sudah sampai mana dan apa yang masih harus diselesaikan. Memang kalau dari awal belum terbiasa

mungkin terasa agak sulit, tapi setelah sering digunakan pegawai sudah mulai memahami alurnya." (Hasil wawancara bersama Tekad Kurniawan selaku Kepala Bidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan SIPD Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi terutama didasarkan pada kebutuhan untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, dari keterangan informan dapat dilihat bahwa penggunaan SIPD tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif. Sistem tersebut juga dianggap membantu menciptakan alur kerja yang lebih teratur karena setiap proses memiliki tahapan yang harus dilalui. Ketentuan tersebut secara tidak langsung mendorong pegawai untuk lebih memperhatikan kelengkapan dan kesesuaian data sebelum diproses lebih lanjut.

"Kalau untuk tahapannya, pertama tentu ada arahan dulu dari pemerintah daerah mengenai penggunaan SIPD. Setelah itu dari dinas menyesuaikan bagian-bagian yang memang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Pegawai yang akan menggunakan sistem juga harus mengetahui dulu cara kerjanya. Setelah itu data dan dokumen yang diperlukan disiapkan, baru kemudian dimasukkan ke dalam SIPD sesuai dengan kegiatan yang akan diproses. Setelah diinput, data tersebut harus diperiksa kembali karena jangan sampai ada kesalahan. Kalau ada yang kurang atau salah, diperbaiki dulu. Setelah semuanya sudah sesuai, baru dilanjutkan ke proses berikutnya sesuai dengan alur yang ada di SIPD. Jadi memang tahapannya tidak langsung selesai dalam satu proses, ada persiapan, input, pengecekan, kemudian baru dilanjutkan sampai proses administrasinya selesai."

(Hasil wawancara bersama Tekad Kurniawan selaku Kepala Bidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan SIPD Keuangan dilakukan melalui proses yang terstruktur dan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa persiapan. Tahap awal dimulai dari adanya arahan penggunaan sistem, kemudian dilanjutkan dengan kesiapan pegawai serta penyiapan data dan dokumen. Hal yang cukup ditekankan oleh informan adalah pemeriksaan data setelah dilakukan input. Ini menunjukkan bahwa ketelitian menjadi bagian penting dalam penggunaan SIPD karena kesalahan pada tahap awal dapat mempengaruhi proses administrasi pada tahap berikutnya.

"Untuk input anggaran, yang pertama tentu data anggarannya harus sudah disiapkan dulu sesuai dengan kegiatan yang ada. Jadi operator tidak langsung membuat anggaran sendiri di sistem. Data tersebut berasal dari perencanaan dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Setelah datanya siap, baru operator memasukkan ke dalam SIPD sesuai dengan bagian dan kode yang tersedia. Setelah dimasukkan, harus dicek lagi apakah nominalnya sudah benar, kegiatannya sesuai, dan tidak ada data yang salah. Kalau ada kesalahan, sebelum dilanjutkan harus diperbaiki. Jadi proses input itu harus teliti karena kalau salah dari awal nanti bisa berpengaruh ke proses selanjutnya." (Hasil wawancara bersama Tekad Kurniawan selaku Kepala Bidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penginputan anggaran diawali dengan kesiapan data yang berasal dari kegiatan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Operator berperan dalam memasukkan data ke dalam

sistem, sedangkan substansi data tetap berasal dari dokumen dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan. Adanya pemeriksaan setelah input menunjukkan bahwa ketepatan nominal, kegiatan, dan kode anggaran menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum data dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Kalau ada perubahan kegiatan atau kebutuhan belanja, tentu tidak langsung diubah begitu saja di dalam sistem. Harus dilihat dulu apa yang berubah dan apa alasannya. Setelah itu disesuaikan dengan dokumen perubahan yang ada. Kalau memang sudah ada keputusan untuk melakukan perubahan, baru datanya disesuaikan di SIPD. Jadi perubahan itu tetap mengikuti prosedur, tidak bisa operator mengubah sendiri tanpa ada dasar. Setelah dilakukan perubahan, datanya dicek lagi supaya antara yang ada di sistem dengan dokumen perubahan sama." (Hasil wawancara bersama Tekad Kurniawan selaku Kepala Bidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Dari penjelasan tersebut, perubahan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar terjadi dan harus mempunyai dasar dokumen. Sistem digunakan untuk menyesuaikan data setelah perubahan tersebut mendapatkan dasar yang jelas. Hal ini membuat perubahan anggaran tetap berada dalam pengawasan dan tidak hanya berdasarkan keputusan pengguna aplikasi.

"Kalau untuk mengurangi kesalahan, menurut saya ada membantu. Karena di SIPD data yang dimasukkan mengikuti bagian-bagian yang sudah tersedia. Jadi kita tidak bebas memasukkan sesuai keinginan. Tetapi tetap saja kesalahan bisa terjadi kalau orang yang menginput kurang teliti. Sistem membantu memberikan alur, tetapi yang memasukkan data tetap manusia.

Makanya setelah input tetap harus diperiksa lagi." (Hasil wawancara bersama Tekad Kurniawan selaku Kepala Bidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Menurut keterangan tersebut, SIPD dapat membantu mengurangi kesalahan melalui struktur dan alur yang tersedia dalam sistem, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kesalahan. Ketelitian operator tetap diperlukan karena kualitas data bergantung pada proses input yang dilakukan.

4.2.1.4 Penerapan SIPD dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah

Penerapan SIPD dalam pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan system untuk mencatat dan mengelola realisasi anggran, menginput transaksi dan dokumen pertanggungjawaban, melakukan monitoring serta membantu penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, SIPD dapat mendukung proses pertanggungjawaban agar lebih efektif, tranparan, akuntabel, dan mudah ditelusuri.

"SIPD cukup membantu dalam mengurangi kesalahan karena prosesnya sudah diatur dalam sistem. Tetapi tetap tidak bisa dikatakan semua kesalahan hilang. Kalau datanya dari awal salah, kemudian dimasukkan juga dengan salah, sistem tetap akan menerima sesuai yang diinput. Jadi yang penting bukan hanya sistemnya, tetapi orang yang menggunakan juga harus teliti." (Hasil wawancara bersama Ratna wilis selaku Kepala Subbidang, tanggal 20–31 Agustus 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa SIPD memiliki fungsi sebagai alat bantu pengendalian, bukan sebagai satu-satunya pengaman dari kesalahan. Kesalahan pada sumber data atau proses input masih dapat terjadi sehingga pemeriksaan oleh pegawai tetap dibutuhkan.

Dalam penggunaan SIPD, kesalahan penginputan dapat terjadi sehingga diperlukan proses koreksi. Peneliti kemudian menggali bagaimana langkah yang dilakukan apabila ditemukan kesalahan pada data anggaran.

"Untuk memastikan sesuai, dasarnya tetap dokumen perencanaan. Kita lihat kegiatan apa yang akan dilaksanakan, kemudian kebutuhan anggarannya disesuaikan. Setelah dimasukkan ke SIPD, data tersebut diperiksa kembali. Kalau ada perbedaan angka atau bagian kegiatan yang tidak sesuai, dilakukan penyesuaian. Jadi dokumen tetap menjadi pegangan dalam proses input."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dokumen perencanaan tetap menjadi acuan utama dalam proses penginputan. SIPD digunakan untuk mengelola data yang telah direncanakan, sedangkan kesesuaian data dijaga melalui proses pemeriksaan.

Peneliti juga menanyakan apakah penggunaan SIPD membantu mengurangi kesalahan dalam penginputan anggaran. Pertanyaan ini digunakan untuk melihat manfaat sistem dari sisi ketelitian pengelolaan data

4.2.2 Kendala dalam Penerapan SIPD

Kendala Teknis (Sistem) Gangguan Stabilitas Server Pusat: Server SIPD pusat sering mengalami perlambatan (down atau lemot) ketika diakses secara bersamaan oleh pengguna dari seluruh Indonesia, terutama pada momen krusial seperti akhir tahun anggaran atau saat terjadi perubahan

anggaran dalam jumlah besar. Hambatan Integrasi Data: Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memeriksa, mencocokkan, dan mengoreksi data di dalam sistem agar benar-benar sesuai dengan dokumen fisik atau regulasi anggaran operasional. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) Proses Adaptasi dan Kesiapan Digital: Pegawai (khususnya pegawai senior) masih membutuhkan waktu penyesuaian yang lebih lama karena belum terbiasa dengan sistem komputerisasi baru berbasis web (digital) dan masih terikat pada pola kerja aplikasi lama (SIMDA). Kebutuhan Ketelitian yang Tinggi: Faktor kelalaian manusia (human error) saat menginput data anggaran masih sering terjadi, sehingga sistem tetap memerlukan verifikasi bertahap dari pengguna agar tidak menimbulkan kesalahan berantai pada proses administrasi berikutnya. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak data yang harus disesuaikan, semakin besar pula kebutuhan pemeriksaan. Gangguan akses sistem juga menjadi faktor yang dapat memperlambat proses perubahan anggaran.

Kendala yang muncul tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga dari kebutuhan menyesuaikan data dengan dokumen perubahan. Artinya, perubahan anggaran membutuhkan kesiapan administratif sebelum dilakukan dalam aplikasi.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak data yang harus disesuaikan, semakin besar pula kebutuhan pemeriksaan. Gangguan akses sistem juga menjadi faktor yang dapat memperlambat proses perubahan anggaran.

4.3 Pembahasan

Penerapan SIPD Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi memperlihatkan adanya perubahan dalam pola pengelolaan keuangan daerah, terutama dari proses yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui administrasi dan sistem yang digunakan sebelumnya menuju pengelolaan berbasis sistem yang terintegrasi. Perubahan ini sejalan dengan konsep SIPD Keuangan yang dalam kajian penelitian digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pertanggungjawaban keuangan. Sebelum menggunakan SIPD, proses pengelolaan data lebih membutuhkan koordinasi langsung antarbagian dan pemeriksaan dokumen secara bertahap. Setelah SIPD digunakan, tahapan tersebut ditempatkan dalam satu alur sistem sehingga hubungan antara perencanaan dan pengelolaan keuangan menjadi lebih jelas. Temuan ini memperlihatkan bahwa perubahan yang terjadi bukan hanya pada media yang digunakan, tetapi juga pada cara pegawai mengelola dan menelusuri data keuangan.

Dari sisi pengelolaan data, kondisi tersebut sesuai dengan manfaat SIPD Keuangan yang dijelaskan dalam teori, yaitu adanya database terpadu sehingga data yang sama tidak perlu dimasukkan berulang kali serta adanya validasi terhadap data yang telah dimasukkan. Pada mekanisme sebelumnya, ketelitian dalam mengelola data lebih banyak bergantung pada pegawai dan pemeriksaan dokumen secara manual. Sementara itu, SIPD memberikan struktur input yang membuat pengguna mengikuti bagian dan tahapan yang telah tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut membantu pegawai dalam mengatur data anggaran dan

mengetahui proses yang harus dilakukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vitriana, Agustiawan, dan Ahyaruddin (2022) pada BPKAD Pekanbaru yang menemukan bahwa penerapan SIPD memberikan kemudahan dalam melakukan input data keuangan, meskipun masih terdapat kendala pada beberapa fungsi sistem.

Perbedaan juga terlihat dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran. Sebelum menggunakan SIPD, penyesuaian terhadap kegiatan atau kebutuhan belanja lebih banyak dilakukan melalui penyesuaian dokumen dan koordinasi antarbagian. Setelah menggunakan SIPD, perubahan tersebut harus disesuaikan kembali dalam sistem sehingga data yang terdapat dalam aplikasi tetap mengikuti dokumen dan keputusan yang telah ditetapkan. Kondisi ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa SIPD Keuangan mengintegrasikan tahapan penganggaran dan perubahan anggaran dalam satu sistem. Dengan adanya keterhubungan tersebut, perubahan anggaran tidak hanya dilihat sebagai perubahan angka, tetapi juga harus disesuaikan dengan program, kegiatan, dan dokumen yang menjadi dasarnya. Pola ini membuat proses perubahan lebih terkontrol dibandingkan ketika pengelolaan data masih lebih bergantung pada pencatatan dan koordinasi administratif.

Pada aspek pembagian kewenangan, penggunaan SIPD tidak menghilangkan tugas masing-masing pejabat dan pengelola keuangan, tetapi membuat pekerjaan mereka saling terhubung melalui sistem. PA/KPA tetap berkaitan dengan kewenangan dan persetujuan, PPTK dengan pelaksanaan kegiatan, bendahara dengan administrasi keuangan, sedangkan operator lebih banyak menjalankan proses teknis pada aplikasi.

Kondisi tersebut sesuai dengan konsep sistem informasi manajemen yang menempatkan sistem sebagai pendukung proses kerja organisasi, bukan sebagai pengganti fungsi sumber daya manusia. Hasil penelitian terdahulu Agiltriawan, Ilham, dan Hanif (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen pada instansi pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data, tetapi masih dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan koordinasi antarunit kerja. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi karena penggunaan sistem tetap membutuhkan kerja sama antarpegawai.

Dalam proses pemeriksaan dan verifikasi, SIPD memberikan tambahan mekanisme pengendalian terhadap data yang akan diproses. Sebelumnya, pemeriksaan lebih banyak bertumpu pada pencocokan dokumen, sedangkan setelah menggunakan SIPD pemeriksaan dilakukan dengan melihat kesesuaian dokumen dan data yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini sesuai dengan manfaat SIPD yang menempatkan validasi input sebagai salah satu keunggulan sistem. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem belum dapat menggantikan pemeriksaan manusia. Kesalahan masih dapat terjadi apabila data awal yang diberikan tidak tepat atau terjadi kekeliruan ketika melakukan input. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amri (2022) yang menemukan bahwa penerapan SIPD telah berjalan baik, tetapi masih terdapat persoalan pada aspek sumber daya, khususnya ketersediaan dan akurasi data pendukung.

Penggunaan SIPD juga memperlihatkan hubungan yang lebih jelas antara anggaran dengan proses pencairan dan pertanggungjawaban. Dalam

teori yang digunakan pada penelitian ini, SIPD Keuangan memang dirancang untuk mengintegrasikan penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada kondisi sebelumnya, hubungan antarproses tersebut lebih banyak dijembatani melalui dokumen dan koordinasi administratif. Setelah menggunakan SIPD, data anggaran yang telah dimasukkan menjadi bagian dari proses berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban harus tetap mengacu pada data yang tersedia dalam sistem. Penelitian Wibowo, Sasanti, dan Nurabiah (2023) juga menemukan bahwa penerapan SIPD mempermudah proses penatausahaan dan perencanaan anggaran serta memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Meskipun memberikan kemudahan, penerapan SIPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi belum berarti seluruh proses menjadi tanpa kendala. Pada tahap awal penggunaan, pegawai membutuhkan waktu untuk memahami alur dan cara kerja sistem. Ketika terdapat perubahan data dalam jumlah besar atau gangguan teknis, proses pekerjaan dapat kembali membutuhkan waktu karena data harus diperiksa dan disesuaikan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Pramana (2023) yang menemukan bahwa SIPD memberikan dampak positif terhadap akurasi dan kecepatan pelaporan keuangan, tetapi masih terdapat hambatan berupa sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan sistem berbasis digital. Artinya, keberhasilan penerapan sistem tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan pengguna untuk mengoperasikannya secara tepat.

Jika dibandingkan dengan penelitian Nirmala, Iffansyah, dan Zakir (2023), terdapat persamaan pada persoalan sumber daya manusia dalam penerapan SIPD. Penelitian tersebut menemukan bahwa SIPD telah diterapkan pada seluruh OPD yang diteliti, tetapi kesiapan sumber daya manusia belum sepenuhnya memadai sehingga penatausahaan dan pelaporan belum berjalan maksimal. Sementara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, pegawai juga mengalami proses penyesuaian pada awal penggunaan, tetapi penggunaan yang dilakukan secara terus-menerus membuat pegawai semakin terbiasa dengan sistem. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan sumber daya manusia tidak selalu berhenti pada tingkat kemampuan awal, tetapi dapat berkembang melalui pengalaman, pembiasaan, dan koordinasi selama sistem digunakan.

Kemudahan yang dirasakan setelah pegawai terbiasa menggunakan SIPD menunjukkan bahwa sistem memberikan perubahan dibandingkan mekanisme sebelumnya, terutama dalam keteraturan alur penganggaran, pengelolaan data, pemeriksaan, dan keterhubungan antarproses keuangan. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa SIPD memiliki sifat terintegrasi dan dapat membantu menghasilkan informasi secara lebih efektif dan efisien. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan bahwa SIPD cenderung memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketepatan data, koordinasi, dan stabilitas sistem. Jadi, posisi hasil penelitian ini bukan sekadar menyatakan bahwa SIPD “lebih mudah”, melainkan menunjukkan bahwa SIPD membuat proses pengelolaan

keuangan lebih terintegrasi dan terarah dibandingkan sebelumnya, sementara kualitas pelaksanaannya tetap bergantung pada manusia dan kondisi teknis sistem.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala penerapan SIPD Keuangan tidak hanya berasal dari system, tetapi juga dari pengguna system. Pada tahap awal penerapan, pegawai membutuhkan waktu untuk memahami alur dan cara kerja SIPD. Selain itu, kesalahan pengimputan, perubahan data, serta gangguan teknis dapat meneybabkan proses pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, maka kesimpulan penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan SIPD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil meliputi empat aspek, aspek yang pertama perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, serta pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. SIPD membuat proses pengelolaan anggaran lebih terarah dan data lebih mudah ditelusuri dibandingkan sebelum menggunakan SIPD.SIPD telah digunakan dalam proses pengelolaan keuangan, mulai dari penyusunan, penginputan, pemeriksaan, perubahan anggaran, hingga pencairan dan pertanggungjawaban.
2. Kendala dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan meliputi penyesuaian pegawai dalam memahami sistem, kesalahan penginputan, kebutuhan pemeriksaan dan koreksi data, perubahan anggaran, serta kendala teknis ketika sistem mengalami gangguan. Kendala tersebut dapat menghambat proses pengelolaan keuangan sehingga diperlukan ketelitian, koordinasi antarbagian, kelengkapan dokumen, dan kemampuan pegawai dalam menggunakan SIPD.

5.2 Saran

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam penggunaan SIPD Keuangan melalui pendampingan atau pelatihan secara berkala agar proses penginputan, perubahan, dan pemeriksaan data dapat dilakukan dengan lebih baik.
2. Bagi pegawai pengelola SIPD Keuangan, diharapkan lebih teliti dalam menyiapkan dan menginput data serta melakukan pemeriksaan kembali sebelum data diproses untuk mengurangi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai SIPD Keuangan dengan membahas aspek lain, seperti efektivitas, kualitas sistem, atau pengaruh SIPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arya, S. (2022). Sistem Informasi dan Penerapannya pada Organisasi.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Jogiyanto Hartono. (2017). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Saa'dillah. (2016). Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen.

Sri Yuli Yulianti. (2019). Pengantar Sistem Informasi.

Tata Sutabri. (2016). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi Offset.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

A. C. Pramana. (2023).Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD Kabupaten Nganjuk.

A. H. Rezkiaty. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BKAD Kabupaten Bulukumba.

Agiltriawan, A., Ilham, M., dan Hanif, I. F. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Instansi Pemerintah Daerah.

Alfarishi, A. F. dan Hartati, S. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.

Amri, Z. F. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan di kecamatan (Studi kasus Kecamatan Semarang Timur)*.

Aulia, R. N. (2023). *Penerapan sistem informasi manajemen pada pemerintah daerah*.

Dione dan Utami. (2020). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

Dwi Agus Wibowo, Endar Erawati Sasanti, dan Nurabiah. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah pada Bappeda Kota Mataram.

Irmayani, N. (2017). *Sistem informasi manajemen pada pengelolaan keuangan daerah*.

Nafischa, E. N. (2021). *Efektivitas penerapan sistem informasi terhadap kualitas informasi dan laporan keuangan*.

Nirmala, D., Iffansyah, & Zakir, M. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala*.

Pramana. (2023). *[Penelitian mengenai penerapan SIPD dan akurasi serta kecepatan pelaporan keuangan]*.

Septiani, D. (2024). *Evaluasi efektivitas penggunaan SIPD dalam penyusunan anggaran pada Disdukcapil Kabupaten Batang*.

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). *Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru*.

Wibowo, D. A., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap proses penatausahaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Mataram*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Lampiran 1. Dokumentasi







Daftar Wawancara

1. Bagaimana awal mula penerapan SIPD Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa alasan utama Dinas beralih atau menggunakan SIPD Keuangan dalam pengelolaan keuangan?
3. Bagaimana tahapan penerapan SIPD Keuangan dari awal sampai dapat digunakan dalam kegiatan keuangan?
4. Siapa saja yang mempunyai peran dalam pengelolaan SIPD Keuangan?
5. Bagaimana pembagian kewenangan antara PA/KPA, PPTK, bendahara, operator, dan pihak terkait dalam SIPD Keuangan?
6. Bagaimana proses penginputan anggaran ke dalam SIPD?
7. Bagaimana proses pemeriksaan dan verifikasi data sebelum data keuangan diproses?
8. Bagaimana proses perubahan anggaran apabila terdapat perubahan kegiatan atau kebutuhan belanja?
9. Bagaimana keterkaitan SIPD Keuangan dengan proses pencairan dan pertanggung jawaban anggaran?
10. Bagaimana proses penyusunan anggaran dilakukan melalui SIPD Keuangan?
11. Bagaimana program dan kegiatan Dinas dimasukkan ke dalam SIPD?
12. Bagaimana cara memastikan anggaran yang diinput sesuai dengan kebutuhan dan dokumen perencanaan?
13. Apakah SIPD membantu mengurangi kesalahan dalam penginputan anggaran?
14. Bagaimana proses koreksi apabila terdapat kesalahan dalam penginputan anggaran?

15. Apakah terdapat kendala ketika melakukan perubahan atau penyesuaian anggaran?
16. Bagaimana proses verifikasi anggaran sebelum disahkan?
17. Apakah penggunaan SIPD membuat proses penganggaran lebih mudah dibandingkan sebelumnya?

Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR:137/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam KuantanSingingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : Diskhamarzaweny, SE., MM sebagai pembimbing I
   b. Nama : Yeni Sapridawati, SE., S.Ak sebagai pembimbing II

   Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
   Nama : Lisa Pratiwi
   NPM : 220412014
   Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Dearah (SIMDA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kuantan Singingi
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Akuntansi dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Akuntansi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025
Dekan,

SARJAN M, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1008128002

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Akuntansi*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

Lampiran 3. Surat Balasan Riset

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Telp/Fax.(0760) 561629 Kode Pos 29362 E-Mail : *disdukcapil@kuansing.go.id*
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN
Nomor: 400.7.22.1/Disdukpencapil-Sekr/175

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa:

NAMA	**: LISA PRATIWI**
NIM	**: 220412014**
JURUSAN	**: AKUNTANSI**
FAKULTAS	**: ILMU SOSIAL**
JENJANG PENDIDIKAN	**: S1**

Nama tersebut diatas telah melakukan kegiatan riset/pra riset tentang judul penelitian yaitu **"ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"** mulai tanggal 05 Mei 2026 Sampai dengan 05 Agustus 2026.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Teluk Kuantan, 18 September 2026

An.KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

DIAN ENGGRIANI, S.Sos
NIP. 19761113 201001 2 006

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4. Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	LISA PRATIWI
NPM	:	220412014
Pembimbing I	:	Diskhamarzaweny, SE., MM
Pembimbing II	:	Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
Judul skripsi	:	Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen SIMDA Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	20/1-2026	Revisi bab I sesuai saran		
2.	6/3-2026	Revisi bab II - III sesuai saran		
3.	14/4-2026	Revisi bab III sesuai saran		
4.	23/4-2026	ACC utk Seminar Proposal		
5.	21/5-2026	ACC utk Seminar Proposal		
6.	21/5 2026	Perbaiki daftar isi Perbaiki spasi latar belakang lihat di proposal		
7.	17/6 2026	Perbaiki penulisan Perbaiki spasi		
8.	18/6 2026	Acc Seminar proposal		

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

Dipindai dengan CamScanner

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Lisa pratiwi
NPM : 220412014
PEMBIMBING 1 : Diskhamarzaweny, SE.,MM
PEMBIMBING 2 : Yeni Sapridawati, SE., M. AK
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tanggal /Bulan/ Tahun	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing 1	Paraf Pembimbing 2
1.	10/9-2026	Revisi bab III dan IV Segera Saran		
2.	14/9-2026	Revisi Hasil Penelitian dan Pembahasan Segera Saran		
3.	16/9 2026	Perbaiki daftar isi perbaik penulisan, jenis huruf perbaiki daftar pustaka		
4.	17/09 2026	Acc ujian Skripsi		
5.				

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

YENI SAPRIDAWATI, SE., M.AK
NIDN. 1011019002

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5. Lembar Persetujuan Pembimbing untuk revisi Proposal

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Lisa Pratiwi**
NPM : 220412014
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Jum'at / 19 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rina Andriani, SE.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Yeni Sepridawati, SE.,M.Ak	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

Lampiran 6. Lembar Persetujuan Pembimbing untuk revisi Skripsi

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Lisa Pratiwi**

NPM : 220412014

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Senin / 21 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Irwan, SE.,MM	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Yeni Sepridawati, SE.,M.Ak	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp 0760-561655 Fax 0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 8 Mei 2026

No : 121/FIS/UNIKS/PMH/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohona Pra Riset

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi - Teluk Kuantan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Lisa Pratiwi
NPM	: 220412014
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Derah (SIPD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
Lokasi Penelitian	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian,wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan FIS

SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 160/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:121/FIS/UNIKS/PMH/V/2026 Tanggal 8 MEI 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**LISA PRATIWI**
NIM	:	220412014
Jurusan	:	AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 12 Mei 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

I.Identitas Diri



1. Nama : Lisa Pratiwi
2. Ttl : Batam, 01 Januari 2004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Rumah : Siberakun
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Nomor HP : 0812-9043-3084
8. Alamat email : lisapratiwi0101@gmail.com

II.Riwayat Pendidikan : -

1. Tahun 2010-2016 SDN 026 Siberakun
2. Tahun 2016-2019 SMPN 1 BENAI
3. Tahun 2019-2022 SMA N 1 BENAI

III.Riwayat Prestasi :

1. SDN 026 Siberakun, selalu masuk peringkat 5 besar
2. SMPN 1 Benai, selalu masuk peringkat 10 besar
3. SMA N 1 Benai, selalu masuk peringkat 15 besar

IV.Pengalaman

1. Magang Di Kantor Disdukcapil Kuansing Bulan Juli s/d September 2025.